



B A B I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desaprovinci Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

- Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.



- Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan dan sosial budaya masyarakat;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - b. Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.



- 4) Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Desa;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.

- 5) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.

- 6) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2017



D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 84 pegawai yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah : 54 orang
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 0 orang
- c. Non PTT : 30 orang

Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 2017 :

No	Jumlah PNS	
1	Menurut Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
	a. Pembina Utama Madya (golongan IV/d)	1
	b. Pembina Tingkat I (golongan IV/b)	4
	c. Pembina (golongan IV/a)	10
	d. Penata Tingkat I (golongan III/d)	20
	e. Penata (golongan III/c)	3
	f. Penata Muda Tingkat I (golongan III/b)	8
	g. Penata Muda (golongan III/a)	4
	h. Pengatur Tingkat I (golongan II/d)	1
	i. Pengatur (golongan II/c)	2
	j. Pengatur Muda Tingkat I (gol. II/b)	0
	k. Pengatur Muda (golongan II/a)	0
	l. Juru Tk.I (golongan I/d)	1
	Jumlah	54
2	Menurut Tingkat Pendidikan	
	a. Pasca Sarjana (S2)	15
	b. Sarjana (S1)	24
	c. Sarjana Muda (D3)	1
	d. SLTA	10
	e. SLTP	1
	f. SD	0
	Jumlah	54
3	Menurut Gender	
	a. Laki-Laki	28
	b. Perempuan	26
	Jumlah	54



Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	3	1	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kasubbag	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Kasi	7	5	6	6	-	-	5	7	-	-	-	-
Jlh PNS NON-STRUKTURAL	16	17	2	27	3	1	4	17	1	10	1	
Jlh Honor/PTT	22	8	-	-	-	-	-	14	3	2	1	1
Jlh PNS + Honor/PTT	51	33	15	35	3	1	16	40	4	12	2	1



E. Aspek Strategis Organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Aspek strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mencakup :

- a. Pengembangan kapasitas masyarakat beserta kelembagannya, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Pos Pelayanan Terpadu/Posyandu, dan lembaga adat.
- b. Pengembangan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa/BUMDes., Lumbung Pangan Masyarakat Desa/LPMD, Pasar Desa, Badan Perkreditan Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP.
- c. Pengembangan sarana teknologi tepat guna.
- d. Pengembangan kapasitas aparatur desa/kelurahan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- e. Pengembangan koordinasi lintas sektor, termasuk koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
2. Rencana pembangunan *Pan Borneo Highway*;
3. Kecenderungan harga minyak mentah yang kian tinggi;
4. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
5. Pentingnya pengembangan industri agribisnis di masa depan;
6. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
7. Pencapaian MDG's;



8. Pencapaian MP3EI;
9. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi; dan
10. Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian izin eksploitasi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan belum optimal.
2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
4. Rendahnya pendayagunaan dan penerapan teknologi tepat guna yang berbasis sumberdaya lokal.
5. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Guna mendukung pekerjaan sehari-hari tersedia sarana dan prasarana kerja pendukung sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	8.228	M2
2	Gedung	3	Unit (3 lantai)
3	Listrik	1	jaringan
4	Air	1	jaringan
5	Telepon	2	jaringan
6	Area Parkir	3	area
7	Ruang Rapat	2	ruang
8	Taman	1	area
9	Masjid	1	unit

(Daftar Terlampir)



B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah menyusun dan menetapkan rencana kinerja secara matang dan terukur. Penjabaran dari penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. **V i s i**

” Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kalimantan Timur yang Mandiri dan Sejahtera ”

Visi diatas mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mempunyai untuk membangun diri dan lingkungan sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- 2) Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang merasa tercukupi atas semua kebutuhan hidupnya baik secara jasmaniah maupun rohaniah.

2. **M i s i**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di desa dan kelurahan secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi perekonomian desa/kelurahan secara optimal.



4. Mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang mampu mengelola potensi sumberdaya alam local dengan memanfaatkan TTG berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.

3. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan masyarakat Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan Lembaga Ekonomi.
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat Kalimantan Timur.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin perdesaan dalam proses pembangunan.
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan masyarakat perdesaan dan kelurahan.
4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat.
6. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
7. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja DPMPD
9. Keterpaduan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
10. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.
11. Meningkatnya Disiplin Aparatur.
12. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur DPMPD.



5. Strategi

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Peningkatan peran, partisipasi dan swadaya masyarakat.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam pembangunan.
4. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi.
6. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan produktivitas.
8. Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
9. Meningkatkan kualitas SDM perencana.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
11. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur DPMPD secara optimal.
12. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur DPMPD.
13. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan DPMPD.

6. Kebijakan

1. Peningkatan pembinaan aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.
2. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.



3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.
4. Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi Perdesaan dan Kelurahan.
6. Peningkatan pembinaan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
8. Meningkatkan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM perencanaan.
10. Meningkatkan kemampuan tenaga administrasi kantor.
11. Mengadakan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan.
12. Meningkatkan pembinaan, pengembangan serta memberikan peluang bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
13. Meningkatkan pembinaan, memotivasi serta memberikan peluang bagi tenaga pengelola keuangan untuk pendidikan dan pelatihan.

7. Program dan Kegiatan

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran



2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 5). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 2. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.
 3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
 4. Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 6). Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
 1. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 7). Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8). Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat
 1. Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
- 9). Program peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna
 1. Pemasyarakatan dan pengembangan peenerapan teknologi tepat guna
- 10). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai – Nilai Kegotong – royongan.
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 3. Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga.
 4. Pembinaan Hidup Sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan.
- 11). Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 12). Program pembangunan Desa dan Kawasan
 1. Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian s.d Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran Tahun				
							2014	2014	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik		Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	1	1
2	Meningkatkan kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	1	1	1	1	1	1
				Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	6	6	6	6	6	6
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Unit Posyandu	8	950	950	950	10	10



					Unit PMT - AS	3	3	3	3	3	3
					Unit PKK	30	203	203	203	30	30
					Unit MHA	5	-	-	-	5	5
					KPM	50	100	100	100	50	50



3	Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya local melalui peningkatan keterampilan berusaha dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat		Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes Yang Terbentuk	Unit	15	-	-	-	15	15
4	Mewujudkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dan kelurahan dalam mengelola potensi SDA loKal dengan memanfaatkan teknologi tepat guna secara optimal		Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	Unit	18	30	18	18	18	18
			Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Pokmas	17	30	17	17	17	17



			Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan	1	-	-	-	1	1
				Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	5	-	-	-	5	5
				Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi	4	-	-	-	4	4
			Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	Posyantek	15	-	-	-	15	15



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM/KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN/SASARAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik dan akuntabel	1 Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	1 Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2 Meningkatkan kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan ungsi secara optimal	2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
		2 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan		
			Unit Posyandu		
			Unit PMT- AS		



			Unit PKK		
			Unit MHA		2 Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
			KPM		3 Pengembangan Kapasitas Masyarakat
3 Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya lokal melalui peningkatan keterampilan berusaha dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	3 Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	1 Jumlah BUMDes yang Terbentuk	Unit	1 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 Pemasyarakatan dan pengembangan Penerapatn Teknologi Tepat Guna
		2 Jumlah BUMDes yang Aktif	Unit		
		3 Jumlah Pasar Desa yang Aktif	Unit		



4	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dan Kelurahan dalam mengelola potensi SDA lokal dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna secara optimal	4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	1	Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	Unit	1	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	1	Pemasyarakatan dan pengembangan Peneraptn Teknologi Tepat Guna
		5	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Unit				
		6	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan	1	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	1	Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan
				2	Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD				



		3	Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi				
	7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	Posyantek	1	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	1



II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	1	Capaian Desa / Kelurahan yg berhasil dlm pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan (angka absolute)	Provinsi/ Kab/ Kota	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	1	Meningkatnya Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	6	Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang berprestasi (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Unit Posyandu	10	Meningkatnya Nilai Gizi Anak	Jumlah Unit Posyandu yang dibina (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat



			Unit PMT - AS	3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Unit PMT - AS yang dibina (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			Unit PKK	30	Meningkatnya Peran PKK	Jumlah Unit PKK yang dibina (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			Unit MHA	5	MHA Berpartisipasi Dalam proses Pembangunan	Jumlah MHA yang terinventarisasi (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			KPM	50	Mewujudkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat Dalam Upaya Penguatan Pengembangan Kader Kapasita Masyarakat	Jumlah KPM sebanyak 50 orang yang diberikan bimbingan dan pengarahan melalui penguatan pengembangan kapasitas kader Masyarakat di Kab. Kukar	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat



3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes Yang Terbentuk	Unit	15	Mengukur jmlah BUMDesa yang berhasil dibentuk sesuai UU No. 6/2014; PP.No.43/2014; dan Permendesa, PDTT No. 4/2015	Jumlah BUMDesa yang berhasil dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan Desa diwilayah Kabupaten	Laporan Data Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dari daerah Kabupaten	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan PosyanteK / Wartek yang Terbentuk	Unit	18	Membentuk lembaga masyarakat yang memberikan pelayanan teknis informasi pemanfaat TTG	Jumlah Pengelolaan PosyanteK / Wartek yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010	Laporan pengembangan PosyanteK/ Wartek TTG di Kabupaten/ Kota	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
5	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Pokmas	17	Pembentukan Pokmas Berdasarkan Surat Mendagri No. 413.5/1184/SJ/ tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Fasilitas Umum dilingkungan Permukiman masyarakat dan ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kaltim Tahun 2012 dan 2015. Dan Surat Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah	Laporan Perkembangan dan pembentukan dari Kabupaten/ Kota	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna



6	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan	1	Menuju Desa Mandiri	Jumlah Laporan (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
					Menjadi Pendamping Profesional Desa	Jumlah Laporan (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
					Terciptanya Desa yang Mandiri	Jumlah Laporan (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	5	Terciptanya Badan Kerjasama Antar Desa yang Mandiri	Jumlah Unit BKAD yang dibina (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi	4	Agar Sistem informasi Desa dapat diakses seluruh Desa di Kaltim	Jumlah Sistem (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan



7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	Posyantek	15	Membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan teknis informasi pemanfaat Teknologi Tepat Guna sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian	Jumlah Posyantek yang dibina (angka absolute)	Laporan pertanggung jawaban Posyantek/ Wartek TTG di Kabupaten/ Kota	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
---	--	--	-----------	----	--	---	--	--



III. PERJANJIAN KINERJA

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1 Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	1 Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 1 TW 4 : 0
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 1
	2 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 6 TW 4 : 0
		Unit Posyandu	TW 1 : 1 TW 2 : 4 TW 3 : 3 TW 4 : 2
		Unit PMT-AS	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 3
		Unit PKK	TW 1 : 5 TW 2 : 10 TW 3 : 15 TW 4 : 5
		Unit MHA	TW 1 : 0 TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : 2
		KPM	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 50 TW 4 : 0
3 Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	1 Jumlah BUMDes yang Terbentuk	Unit	TW 1 : 4 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 3



	2	Jumlah BUMDes yang Aktif	Unit	TW 1 : 4 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 4
	3	Jumlah Pasar Desa yang Aktif	Unit	TW 1 : 4 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 3
4		Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	1 Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	Unit TW 1 : 3 TW 2 : 7 TW 3 : 5 TW 4 : 3
5		Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Unit TW 1 : 3 TW 2 : 7 TW 3 : 5 TW 4 : 3
6		Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1 Meningkatkan Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 1
			2 Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD TW 1 : 0 TW 2 : 3 TW 3 : 2 TW 4 : 0
			3 Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 0 TW 4 : 2
7		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	Posyantek TW 1 : 3 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 2



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi system AKIP Tahun Sebelumnya.

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30 %	20.10	20.20
2	Pengukuran Kinerja	25 %	14.30	15.31
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9.98	10.42
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6.25	5.98
5	Capaian Kinerja	20 %	13.88	11.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	64.50	63.16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2016 memperoleh nilai sebesar 63.16 dengan predikat penilaian "B".

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Implementasi SAKIP

- 1) Renstra yang telah disusun supaya menetapkan tujuan dan sasaran dengan indicator kinerja yang berorientasi hasil.
- 2) Dokumen RKT agar diimplementasikan untuk mengukur dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.



- 3) Dokumen Indikator Kinerja Utama agar dilakukan reviu secara berkala dan dimanfaatkan dalam penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan serta membangun mekanisme pengumpulan data kinerja berikutnya.
 - 4) Informasi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) agar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja yang berikutnya.
 - 5) Evaluasi atas program yang telah dilaksanakan agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan maupun peningkatan kinerja. Selanjutnya hasilnya agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
 - 6) Meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Permasalahan yang dijumpai dalam evaluasi hampir sama dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan rekomendasi yang dibuatkan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, untuk itu agar terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan dapat direalisasikan dengan segera ditindaklanjuti.
- c. Hal-hal yang ditindaklanjuti dari rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
- 1) Terkait perubahan nomenklatur SKPD dari *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* menjadi *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur* berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, maka tahun 2017 dilakukan review Renstra Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

- 2) Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi per Triwulan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran.
- 3) Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Rencana Kerja juga dilakukan secara periodik / per triwulan dalam rangka identifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan sehingga dapat segera dicarikan solusi untuk ditindaklanjuti.



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRI WULANAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	1 Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	1	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III	1	1	100
					Triwulan IV			
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	1	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	1	1	100
		2 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	6	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III	6	6	100
					Triwulan IV			



			Unit Posyandu	10	Triwulan I	1	1	100
					Triwulan II	4	4	100
					Triwulan III	3	3	100
					Triwulan IV	2	0	0
			Unit PMT-AS	3	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	3	3	100
			Unit PKK	30	Triwulan I			
					Triwulan II	10	10	100
					Triwulan III	15	15	100
					Triwulan IV	5	5	100
			Unit MHA	5	Triwulan I			
					Triwulan II	1	1	100
					Triwulan III	2	2	100
					Triwulan IV	2	2	100



3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	1 Jumlah BUMDes yang Terbentuk	KPM	50	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III	50	50	100
					Triwulan IV			
		2 Jumlah BUMDes yang Aktif	Unit	15	Triwulan I	4	0	0
					Triwulan II	4	0	0
					Triwulan III	4	15	375
					Triwulan IV	3	0	0
		3 Jumlah Pasar Desa yang Aktif	Unit	16	Triwulan I	4	4	100
					Triwulan II	4	4	100
					Triwulan III	4	3	75
					Triwulan IV	4	4	100
					Triwulan I	4	3	75
					Triwulan II	4	3	75
					Triwulan III	4	2	50
					Triwulan IV	3	6	200



4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	1	Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	Unit	18	Triwulan I	3	1	33.33
						Triwulan II	7	4	50
						Triwulan III	5	5	100
						Triwulan IV	3	8	266.7
5	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Unit	17	Triwulan I	4	4	100
						Triwulan II	4	4	100
						Triwulan III	4	4	100
						Triwulan IV	5	4	80
6	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan	1	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	1	1	100



		2	Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	5	Triwulan I	0	2	200
						Triwulan II	3	1	33.33
						Triwulan III	2	2	100
						Triwulan IV			
		3	Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi	4	Triwulan I	1	1	100
						Triwulan II	1	1	100
						Triwulan III			
						Triwulan IV	2	2	100
7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah PosyanteK Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	PosyanteK	15	Triwulan I	3	10	333.33
						Triwulan II	5	2	40
						Triwulan III	5	0	0
						Triwulan IV	2	3	150



C. Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	laporan	1	1	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	laporan	1	1	1	tetap

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:

- Dari hasil realisasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur desa dan Kelurahan” dapat dikatakan berhasil dengan capaian 100%. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang berhasil dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang pemerintahn Desa dan Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1) Terkait penataan desa/kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi sudah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, dengan telah ditetapkannya Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka mekanisme Pembentukan Desa harus menyesuaikan dengan peraturan perundangan/regulasi yang berlaku untuk selanjutnya mendapatkan Rekomendasi Gubernur berupa Penerbitan



Kode Register Desa Persiapan dan Nomor Registrasi PERDA Penataan Desa/Kelurahan.

- 2) Melakukan pembinaan kepada Kabupaten terkait pengelolaan keuangan desa melalui Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa (Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Raperbup tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten, Raperbup tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten, Raperbup tentang Penetapan Rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten, Raperbup tentang Aset Desa dan Raperbup tentang Kewenangan Desa).
- 3) Penyampaian Surat-Surat dan membuat Grup *Whatsapp* (beranggotakan Bidang Pemdes DPMPD Provinsi, DPMPD dan BPKAD Kabupaten Se-Kaltim atau sebutan lain dan KPPN Samarinda) untuk memantau penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa/Kampung, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- 4) Bentuk pembinaan kepada Kabupaten berupa penyampaian Surat dari Gubernur kepada Bupati Se-Kalimantan Timur dan Surat Kepala DPMPD kepada Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain, perihal surat antara lain terkait :
 - a. Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017
 - b. Permintaan Data Keuangan Desa
 - c. Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017
 - d. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017
 - e. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - f. Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017
 - g. Panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
- 5) Berdasarkan data yang yang didapat dari Kabupaten melalui Surat dan Grup *Whatsapp*, khusus untuk monitoring penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUD) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dapat dilaporkan sebagai berikut:



No	Kabupaten	Jlh Desa	Pagu DD	RKUN ke RKUD Tahap I (60%)	RKUN ke RKUD Tahap II (40%)
1	PASER	139	110,045,744,000	66,027,446,400	44,018,297,600
2	KUTAI KARTANEGARA	193	154,651,907,000	92,290,867,100	61,860,762,800
3	BERAU	100	84,106,487,000	49,564,144,000	33,642,594,000
4	KUTAI BARAT	190	149,709,702,000	89,825,821,200	59,883,880,800
5	KUTAI TIMUR	139	119,762,483,000	69,430,544,581	47,904,993,200
6	PENAJAM PASER UTARA	30	27,736,025,000	16,641,615,000	11,094,410,000
7	MAHAKAM ULU	50	46,407,899,000	27,844,739,400	18,563,159,600
TOTAL		841	692,420,247,000	411,625,177,681	276,968,098,000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat Pagu Dana Desa di 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 692.420.247.000 dengan total penyaluran dari RKUN ke RKUD(Tahap I dan Tahap II) di 7 (tujuh) Kabupaten sebesar Rp. 688.603.276.481 atau sebesar 99,45 %, masih terdapat sisa di RKUN sebesar Rp. 3.826.971.319 atau 0,55 % dengan rincian sisa untuk Kabupaten Berau sebesar Rp. 889.748.200, Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 500.277.100 dan Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.426.945.219. Adanya sisa di RKUN disebabkan adanya pemotongan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan karenadi 3 (tiga) Kabupaten tersebut belum menyalurkan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya, dimana hal tersebut disebabkan oleh Desa yang belum mempertanggungjawabkan Dana Desa yang diterima tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten juga



tidak dapat menyalurkan ke Desa sesuai aturan penyaluran dana desa.

Kinerja penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Kalimantan Timur yang ditotal dari 7 (tujuh) Kabupaten dan dibuat rata-rata untuk Tahap I sebesar 99,08% sedangkan untuk Tahap II sebesar 96,18%. Bila dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99% dan untuk penyaluran Tahap II sebesar 95%. Kenaikan kinerja penyaluran Tahap I untuk tahun 2017 hanya 0,08% sedangkan Tahap II naik 1,18%. Dana Desa di 5 (lima) Kabupaten belum 100% disalurkan karena Desa belum melaporkan SPJ untuk penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya karena kurangnya kemampuan atau kapasitas aparat desa.

- 6) Melakukan pembinaan kepada Kabupaten berupa penyampaian Surat Kepala DPMPD kepada Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain, perihal suratantara lain terkait : Penyampaian Surat-Surat secara langsung, melalui Email dan *Whatsapp*(Bagi yang membidangi) pada DPMPD Kabupaten atau sebutan lain) Se-Kalimantan Timur;
 - a. Pemutakhiran Data Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - b. Pemutakhiran Data Kepala Desa Se – Kalimantan Timur
 - c. Pemutakhiran Data Lurah Se – Kalimantan Timur
 - d. Pemutakhiran Data Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Pemutakhiran Data Desa/Kampung yang melaksanakan Pilkada Serentak
 - f. Pemutakhiran Data Program/Kegiatan PKAD/PTPD Kecamatan

- Peningkatan:

- 1) Kinerja penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Kalimantan Timur yang ditotal dari 7 (tujuh) Kabupaten dan dibuat rata-rata untuk Tahap I sebesar 99,08% sedangkan untuk Tahap II sebesar 96,18%. Bila dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016



di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99% dan untuk penyaluran Tahap II sebesar 95%. Kenaikan kinerja penyaluran Tahap I untuk tahun 2017 hanya 0,08% sedangkan Tahap II naik 1,18%. Dana Desa di 5 (lima) Kabupaten belum 100% disalurkan karena Desa belum melaporkan SPJ untuk penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya karena kurangnya kemampuan atau kapasitas aparatur desa.

- Alternatif Solusi:

- Permasalahan:

- 1) Kebijakan yang berubah-ubah dan lambatnya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat khususnya Penataan sementara Pemerintah Kabupaten berupaya untuk memekarkan beberapa Desa sehingga menjadi kendala bagi kita untuk melakukan penataan.
- 2) Perubahan beberapa regulasi yang cukup mendasar sehingga menyebabkan terkendalanya berbagai proses penyelenggaraan pemerintah desa.
- 3) Tidak terdapat anggaran pada tahun 2017 sehingga pembinaan terkait penataan desa, pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa tidak dapat berjalan dengan maksimal.

- Solusi:

- 1) Memperkuat peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam melaksanakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunan lainnya.
- 3) Meningkatkan pengetahuan aparatur Desa tentang layanan perbankan khususnya gerakan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Perlunya dukungan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah dalam upaya Peningkatan Kapasitas desa dan Kelurahan melalui perimbangan anggaran baik melalui dana APBD maupun APBN.
- 5) Perlunya pembinaan bagi seluruh Aparatur Desa dan Kelurahan khususnya dalam rangka membangun



pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Dari hasil capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa Dan Kelurahan” adalah 100% atau dapat dikatakan berhasil.
 - Tahun anggaran 2017 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit dan untuk sasaran dan indikator kinerja ini tidak mendapatkan alokasi anggaran. Kalau hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai. Berada dalam kondisi seperti ini maka bidang melakukan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga capaian kinerja dapat dikatakan berhasil.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100	0	100



Sasaran 2 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	laporan	1	1	100
2.	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	6	6	100
		Unit Posyandu	10	8	80
		Unit PMT-AS	3	3	100
		Unit PKK	30	30	100
		Unit MHA	5	5	100
		KPM	50	50	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	laporan	1	1	1	0
2.	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	6	6	6	0
		Unit Posyandu	950	950	8	-99
		Unit PMT-AS	3	3	3	0
		Unit PKK	203	203	30	-85
		Unit MHA	-	-	5	100
		KPM	50	50	50	0



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:

- Sasaran ini diungkit dengan “Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan” dan “Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan” dengan capaian rata-rata dari dua indikator kinerja utama adalah sebesar 98.35% dengan realisasi % anggaran sebesar 98.44%.
- Program ini dilaksanakan melalui perlombaan Desa dan Kelurahan dan melakukan pembinaan-pembinaan kegiatan Posyandu, kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
- Maksud pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan adalah mendorong dan member motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.
- Hasil pelaksanaan Lomba Desa dan kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 414.4/59/DPMPD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil penilaian lomba sebagai berikut:
 - 1) Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (juara I)
 - 2) Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (Juara II)
 - 3) Kampung Giring-giring, Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau (Juara III)
 - 4) Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (Juara I)
 - 5) Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (Juara II)
 - 6) Kelurahan Belimbing, Kecamatan Botang Barat, Kota Bontang (Juara III)



- Pada Tingkat Nasional menempatkan Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah Kabupaten Berau dan Kelurahan Muara Jawa ilir, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam 5 (lima) besar Desa dan Kelurahan.
- Hasil akhir dari kegiatan Perlombaaan Desa dan Kelurahan menempatkan Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Juara I Perlombaan Kelurahan tingkat Regional III** sesuai SK.Mendagri No.410-5638 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2017.
- Kegiatan pembinaan Posyandu tercapai dengan hasil sebagai berikut:
 - Untuk Kategori Juara I adalah Posyandu Kesuma I Balikpapan.
 - Juara II posyandu Anyelir Samarinda.
 - Juara III Posyandu Pasir Putih IX Bontang.
 - Untuk Kategori Kabupaten Juara I Posyandu Melati Jatida Berau.
 - Juara II Posyandu Flamboyan Kutai Timur.
 - Juara III Posyandu Nusa Indah II Kutai Kartanegara
- Data TP.PKK Hasil Koordinasi Pembinaan Tahun 2017 sbb:

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kampung
Kutai Kartanegara	Sebulu	Sebulu ilir
	Muara Wis	Lebak Cilog
	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir
	Samboja	Karya Jaya
	Marang Kayu	Sebuntal
Kutai Barat	Tering	Tering Lama
	Melak	Empas
	Sekolaq Darat	Sri Mulyo
	Linggang Bigung	Tutung
	Muara Lawa	Lambing
	Muara Pahu	Mendung
	Penyinggahan	Loa Deras
	Bongan	Lemper
	Barong Tongkok	Mencimai
		Asa
Mahulu	Long Hubung	Mamahak teboq
		Lutan



		Long Hubung
	Laham	Danung Paroy
	Long Bagun	Long Bagun ulu
		Batoq Kelo
		Rukun Damai
		Mamahak Besar
		Ujoh Bilang
		Long Bagun

- Hasil pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan target 5 MHA dan capaian 5 MHA atau 100%.
Data MHA hasil koordinasi MHA Kampung Bena Baru Kabupaten Berau, MHA Wehea Kabupaten Kutai Timur, MHA Kampung Benuaq Kabupaten Kutai Barat sedangkan yang sudah dikukuhkan Bapak Presiden Jokowi adalah MHA Kampung Juaq Asa Kabupaten Kutai Barat dan Kampung Punan Kabupaten Berau.
- Peningkatan/Penurunan:
 - Tahun 2017 kondisi Tahun anggaran 2017 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Kalau hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai, karena anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sangat kecil dan sangat jauh dari ideal untuk membiayai sebuah kegiatan pembangunan. Berada dalam kondisi seperti ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau target yang maksimal. Dari perhitungan persentase capaian kinerja dapat dikatakan bahwa kinerja pada sasaran ini berhasil.
 - Tahun 2017 pada perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat nasional metapkan:
 1. Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah Kabupaten Berau masuk dalam 5 (lima) besar.
 2. Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Juara I Perlombaan Kelurahan Tingkat Regional III.



- Alternatif Solusi:
 - Permasalahan:
 - 1) Permasalahan bidang SDM Aparatur:
 - a. Penguasaan SDM aparatur/pelaksana terhadap substansi program/kegiatan masih rendah.
 - b. SDM aparatur/pelaksana kurang termotivasi dalam mempelajari tugas pokok dan fungsi.
 - 2) Permasalahan Teknis:
 - a. Tidak semua Kabupaten/Kota berpartisipasi mengikuti Perlombaan desa dan Kelurahan Tahun 2017. Dari 10 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur hanya 4 Kabupaten dan 2 Kota yang mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Bontang sefangkan Kabupaten/Kota yang tidak berpartisipasi adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu serta Kota Samarinda.
 - b. Kebijakan yang berubah-ubah dan lambatnya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat khususnya penataan sementara Pemerintah Kabupaten berupaya memekarkan beberapa Desa sehingga menjadi kendala bagi kita untuk melakukan penataan.
 - c. Perubahan beberapa regulasi yang cukup mendasar sehingga menyebabkan terkendalanya berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Tidak terdapat anggaran pada tahun 2017 sehingga pembinaan terkait penataan desaa, pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa tidak dapat berjalan dengan maksimal.
 - e. Tingkat pemahaman aparatur Desa dan masyarakat terhadap Masyarakat Hukum Adat masih rendah.
 - f. Tingkat pemahaman aparatur Desa terhadap teknis penyusunan Peraturan Desa belum optimal.
 - g. Beberapa daerah/desa dikabupaten yang mengusulkan desanya untuk menjadi MHA
 - h. Sudah adanya Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA di Prov. Kaltim namun belum disosialisasikan.



- i. Di kabupaten berpotensi untuk melaksanakan hukum adat untuk desa-desa yang masih mempunyai secara kental tentang adat dan budaya
- j. Komitmen Kepala Desa untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBDesa guna pemberdayaan kesejahteraan keluarga masih rendah.
- k. PKK Desa belum memahami secara benar tentang pengisian data umum PKK
- l. h. Pelaksanaan Penilaian Pelaksana Terbaik Posyandu di akhir tahun dengan dana APBD-P yang cair di triwulan IV.
- m. Sosialisasi terhadap tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat masih kurang.
- n. Kurangnya motivasi , penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

3) Permasalahan Kebijakan:

Kebijakan penganggaran untuk kegiatan ekonomi di pedesaan Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sangat rendah dan jauh dari ideal untuk membiayai sebuah kegiatan pembangunan.

• Solusi:

- 1) Sosialisasi Lomba Desa dan Kelurahan untuk menekankan mengenai pentingnya penganggaran terkait Lomdeskel serta menjelaskan bahwa Lomdeskel merupakan program nasional yang dicanangkan setiap tahun oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga diharapkan mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas bagi Kabupaten/Kota.
- 2) Membuat surat edaran dalam rangka evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan secara berjenjang ditingkat Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Tingkat Regional (Nasional).
- 3) Memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi kepada para pelaksana yang berada dibawah kendali.
- 4) Meningkatkan intensitas sosialisasi serta kualitas pembinaan pengembangan MHA dan TP PKK.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten/Kota.



- 6) Merekomendasikan kepada TAPD Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar dapat memberikan dukungan anggaran yang maksimal untuk membiayai kegiatan pengembangan MHA dan TP PKK.
 - 7) Perlu dialokasikan di APBD murni Kegiatan Penilaian Pelaksana Terbaik Posyandu seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan dipertengahan tahun.
 - 8) Perlunya pembinaan terhadap PKK yang berkesinambungan dari provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
 - 9) Perlu alokasi anggaran untuk pembinaan PKK.
 - 10) Perlu sosialisasi tentang MHA
 - 11) Tersedianya dana untuk Rakor MHA se-Kaltim.
 - 12) Study pembelajaran ke provinsi/daerah lain yang sudah mempunyai MHA di desa.
 - 13) Pembinaan aparat DPMPD dalam rangka untuk mengantisipasi usulan dari masyarakat desa tentang MHA.
 - 14) Memberikan fasilitasi pembelajaran, pendampingan dan kaderisasi masyarakat.
 - 15) Meningkatkan intensitas sosialisasi serta kualitas pembinaan pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 - 16) Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten, serta mengoptimalkan kinerja para Kader Pemberdayaan, tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa.
4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Sasaran “ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” diungkit dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan dilaksanakan dalam 3 kegiatan yaitu ;
 - 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - 3) Pengembangan Kapasitas Masyarakat.Dengan capaian rata-rata 98.33 %



- Tahun 2017 terjadi penurunan target dari indikator kinerja, hal ini disebabkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu pada awal tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran ini dapat dikatakan berhasil. Kalau hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai. Berada dalam kondisi seperti ini maka dilakukan strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau target yang maksimal.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100	98.44	1.56
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	96.67		



Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	unit	15	15	100
2.	Jumlah BUMDesa yang aktif	unit	16	15	93.75
3.	Jumlah pasar Desa yang Aktif	unit	15	15	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	unit	0	0	15	100%
2.	Jumlah BUMDesa yang aktif	unit	16	15	15	-6.7%
3.	Jumlah pasar Desa yang Aktif	unit	14	14	15	7.1%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:
 - Tahun 2017 target pembentukan 15 unit BUMDesa dapat tercapai 100 % sbb:

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kampung	Nama BUMDesa
Berau	Biduk-Biduk	Tanjung Prepat	Prepat Jaya
	Batu Putih	Batu Putih	Tajung Buaya-Buaya
	Tali Sayan	Capuak	Lestari Jaya
		Tunggal Bumi	Mekar Jaya
	Gunung Tabur	Batu-Batu	Banua Puri
		Tasuk	Sukses Bersama
Kutai Barat	Damai	Kelian	Kelian Papant Puti
		Jengan Danum	Jengan Danum
		Benung	Ancur Harapan Jaya



		Muara Nyahing	Manan Berebayaq
	Long Iram	Long Iram Bayan	Mulya Sejahtera
		Muara Leban	Leban Jaya Lestari
	Muara Pahu	Tanjung Laong	Tanjung Laong Mandiri
	Mook Manaar Bulat	Linggang Marimun	Marimun maju

- Hasil Koordinasi pembinaan BUMDesa aktif 2017 target 16 unit capaian 15 unit atau 93.75%, sbb:

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kampung	Nama BUMDesa
Paser	Tanah Grogot	Tepian Batang	Tepian Jaya
		Sempulang	Fajassama Abadi
Kutai Timur	Rantau Pulung	Rantau Makmur	Rama Mandiri
		Manunggal Jaya	Mulyo Jaya
Penajam Paser Utara	Sepaku	Telemow	Bina Bersama
Kutai Barat	Penyinggahan	Minta	BUMK Kampung Minta
	Barong Tongkok	Geleo Baru	BUMK Peluat
	Long Iram	Sukomulyo	BUMK Sumber Agung
	Nyuatan	Terajuk	BUMK Kampung Terajuk
Kutai Kartanegara	Anggana	Anggara	Alamanda
	Marang Kayu	Santan Tengah	Madani
	Muara Wis	Muara Enggelam	Bersinar Desaku
Berau	Sambaliung	Gurimbang	Gurimbang Mandiri
	Maratua	Teluk Alulu	Pamoaahan
		Paying-Payung	Malatua Payung Sejahtera
	Pulau Derawan	Pegat Betumbuk	SMART

- Hasil Koordinasi pembinaan Pasar Desa aktif 2017 target 15 unit capaian 15 unit atau 100%, sbb:

Kabupaten	Kecamatan	Desa/kampung	Status Kepemilikan
Penajam Paser Utara	Sepaku	Wonosari	Pemerintah desa
Kutai Kartanegara	Loa Janan	Loa Janan Ulu	Pemerintah Desa
Kutai Barat	Barong Tongkok	Muara Asa	Pemerintah Kampung



Berau	Teluk Bayur	Labanan jaya	Pemerintah Kampung
	Sambaliung	Bebanir Bangun	Pemerintah Kampung
	Talisayan	Eka Sapta	Pemerintah Kampung
		Purnasari Jaya	Pemerintah Kampung
Paser	Paser Belengkong	Paser Belengkong	Pemerintah Desa
		Suliliran Baru	Pemerintah Desa
	Kuaro	Tanjung Harapan	Pemerintah Desa
		Keluang Pasir jaya	Pemerintah Desa
	Long Ikis	Bukit Seloka	Pemerintah Desa
Kutai Timur	Kaubun	Bumi Rapak	Pemerintah Desa
	Sanggatta Selatan	Sangkima	Pemerintah Desa
	Kongbeng	Margamulya	Pemerintah Desa

- Peningkatan/Penurunan:
 - Tahun 2017 rata-rata capaian kinerja dari indikatornya adalah 97.92% dimana pada indikator "Jumlah BUMDesa yang terbentuk capaiannya 100%, indikator "Jumlah BUMDesa yang aktif capaiannya 93,75% dari target 2017, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 capaiannya 100% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi sedikit penurunan yaitu 6.7% atau sekitar 1 unit.
- Alternatif Solusi:
 - Permasalahan:
 - 1) Permasalahan bidang SDM Aparatur:
 - a. Penguasaan SDM aparatur/pelaksana terhadap substansi program/kegiatan masih rendah.
 - b. SDM aparatur/pelaksana kurang termotivasi dalam mempelajari tugas pokok dan fungsi.
 - 2) Permasalahan Teknis:
 - a. Tingkat pemahaman aparatur Desa dan masyarakat terhadap BUMDesa masih rendah.
 - b. Tingkat pemahaman aparatur Desa terhadap teknis penyusunan Peraturan Desa belum optimal.
 - c. Terbatasnya sumber penyertaan modal untuk pengembangan BUMDesa.



- d. Terbatasnya ketersediaan SDM pengelola BUMDesa yang mempunyai kompetensi dibidang ekonomi.
 - e. Komitmen Kepala Desa untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBDesa guna pengembangan ekonomi desa masih rendah.
- 3) Permasalahan Kebijakan:
- Kebijakan penganggaran untuk kegiatan ekonomi di pedesaan Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sangat rendah dan jauh dari ideal untuk membiayai sebuah kegiatan pembangunan.
- Solusi:
 - 1) Memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi kepada para pelaksana yang berada dibawah kendali.
 - 2) Meningkatkan intensitas sosialisasi serta kualitas pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa khususnya penguatan lembaga BUMDesa dan Pasar Desa.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten, serta mengoptimalkan kinerja para tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa.
 - 4) Merekomendasikan kepada TAPD provinsi Kalimantan Timur dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar dapat memberikan dukungan anggaran yang maksimal untuk membiayai kegiatan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.
4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tahun 2017 kondisi Tahun anggaran 2017 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Kalau hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai, karena anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sangat kecil dan sangat jauh dari ideal untuk membiayai sebuah kegiatan pembangunan. Berada dalam kondisi seperti ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau target yang maksimal.



5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	97.92	98.98	-1.06
		Jumlah BUMDesa yang aktif			
		Jumlah pasar Desa yang Aktif			

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lembaga pos Pelayanan Teknologi/Warung Teknologi Perdesaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Kelembagaan Posyantek/Wartek yang Terbentuk	unit	18	18	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Kelembagaan Posyantek/Wartek yang Terbentuk	unit	-	-	18	100%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:
- Keberhasilan:
 - Tahun 2017 target pembentukan Posyantek 18 unit tercapai 100% sebagai berikut:



No	Kab/Kota	Kecamatan	Nama Posyantek
1.	Kutai Kartanegara	Anggana	Sungai Cermin
2.	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	Serba Guna
3.	Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Belayan
4.	Samarinda	Loa Janan	Loa Janan Ilir
5.	Samarinda	Palaran	Palaran
6.	Samarinda	Samarinda Kota	Samarinda Kota
7.	Balikpapan	Balikpapan selatan	Posyantek Pinandita
8.	Balikpapan	Balikpapan Utara	Posyantek Balikpapan Utara
9.	Berau	Gunung Tabur	Posyantek Gunung Tabur
10.	Berau	Teluk Bayur	Posyantek Teluk Bayur
11.	Kutai Barat	Mook Manoor Bulatn	Mook Manoor Bulatn
12.	Penajam Paser Utara	Babulu	Posyantek Babulu
13.	Penajam Paser Utara	Penajam	Penajam
14.	Paser	Batu Engau	Sinas Bangau
15.	Paser	Paser Belengkong	Mitra Taka
16.	Paser	Long Ikis	Taka Bekarai
17.	Paser	Kuaro	Muru Makmur
18.	Paser	Long Kali	Harapan Kita

- Peningkatan/Penurunan:
 - Tahun 2017 terjadi peningkatan dengan adanya pembentukan kelembagaan Posyantek sebanyak 18 unit di 7 Kabupaten/Kota
- Alternatif Solusi:
 - Permasalahan:
 - 1) Kurangnya tingkat pemahaman tentang Teknologi Tepat Guna.
 - 2) Rendahnya Sumber Daya Manusia yang terampil.
 - 3) Kurangnya biaya pembinaan kepada Posyantek yang sudah dibentuk.
 - 4) Kurangnya kepedulian terhadap sumber daya alam yang tersedia.



- Solusi:
 - 1) Peningkatan SDM di Desa/Kelurahan.
 - 2) Program/Kegiatan kemasyarakatan melalui studi banding.
 - 3) Pemanfaatan dan pengembangan TTG di Desa/Kelurahan secara Efektif dan efisien.
 - 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas inovasi Teknologi Tepat Guna.
 - 5) Pembinaan berkelanjutan kepada semua Posyantek yang ada.
4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Dengan kondisi anggaran yang mengalami penurunan sangat sulit sekali melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Posyantek.
 - Target pembentukan Posyantek 18 unit dapat tercapai 100% melalui pemaksimalan penggunaan dana/anggaran kegiatan baik itu langsung kelapangan ataupun pembinaan-pembinaan non formal.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan Posyantek/Wartek yang Terbentuk	100	98.65	1.35

Sasaran 5 : Meningkatkan Kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	unit	17	16	94.11



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	unit	17	17	16	-5.9

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:
 - Tahun 2017 capaian target kinerja “Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG” guna mendukung sasaran “Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan TTG” adalah 94,11 % atau dapat dikatakan berhasil, dengan data kelompok masyarakat pemanfaat TTG adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kampung/Kelurahan	Nama KPP	Ket
1	Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Kelurahan Teritip	RT.1	Aktif
			Kelurahan Lamaru	RT.22	Aktif
		Balikpapan Selatan	Kelurahan Sepinggán Baru	RT.24	Aktif
			Kelurahan Sepinggán Baru	RT.44	Aktif
			Kelurahan Gunung Bahagia	RT.12	Aktif
		Balikpapan Tengah	Kelurahan Karang Rejo	RT.78	Aktif
			Kelurahan Mekar Sari	RT.18 dan 19	Aktif
		Balikpapan Utara	Kelurahan Gunung Samarinda	RT.16	Aktif
			Kelurahan Batu Ampar	RT.32 dan 57	Aktif
		Balikpapan Barat	Kelurahan Kariangau	RT.12	Aktif
			Kelurahan Margo Mulyo	RT.13	Aktif
		Balikpapan Kota	Kelurahan Damai	RT.23	Aktif
			Kelurahan Prapatan	RT.14	Aktif
2	Kab.Kutai Timur	Busang	Desa Long Bentuk	Desa Long Bentuk	Aktif
		Karangan	Desa Batu Lepoq	Desa Batu Lepoq	Aktif
3	Kab. Paser	Tana Grogot	Desa Janju	Desa Janju	Aktif



- Peningkatan/Penurunan:
 - Target kinerja tahun 2017 dan realisasinya mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 17 pokmas menjadi 16 pokmas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 anggaran kita mengalami defisit sehingga anggaran kegiatan dimaksud juga mengalami penurunan.
- Alternatif Solusi:
 - Permasalahan:
 - 1) Untuk Pengelolaan prasarana dan sarana Desa/Kel. dipermukiman Umum hampir tidak ada masyarakat yang mau terlibat langsung menjadi pengurus/anggota dari Pokmas.
 - 2) Kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan masih sangat kurang sehingga perkembangan dalam pembentukan Kelompok Masyarakat pengelolaan prasarana dan sarana (KPP) sangat susah terbentuknya.
 - 3) Tidak ada aturan / payung hukum yang jelas dalam pengelolaan prasarana dan sarana permukiman umum sehingga perkembangan pokmas di Kabupaten/Kota sangat sulit berkembang.
 - 4) Tidak didukung biaya yang memadai dan anggaran yang cukup dan tidak adanya pendampingan dari Kabupaten/Kota.
 - Solusi:
 - 1) Perlu diberikan sosialisasi dan pendampingan sehingga masyarakat mau terlibat akan pentingnya pokmas pengelola prasarana dan sarana fasilitas umum.
 - 2) Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan arti pentingnya pokmas pengelola prasarana dan sarana desa/kelurahan dipermukiman umum.
 - 3) Perlunya aturan/payung hukum yang jelas dan terukur agar lebih dapat diterapkan dan dilaksanakan.
 - 4) Perlunya dukungan biaya yang cukup sehingga pengelolaan prasarana dan sarana permukiman umum di desa/kelurahan dapat terwujud.



- 5) Perlunya dukungan biaya dari Kabupaten/Kota yang memadai sehingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah diprogramkan pihak Universitas Mulawarman dapat terlaksana dengan baik.
 - 6) Universitas Mulawarman perlu meningkatkan anggaran /biaya agar para mahasiswa yang melaksanakan KKN tidak mengalami kesulitan.
4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Target kinerja tahun 2017 dan realisasinya mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 17 pokmas menjadi 16 pokmas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 anggaran kita mengalami defisit sehingga anggaran kegiatan dimaksud juga mengalami penurunan.
 - Capaian kinerja 2017 dapat dikatakan berhasil dengan target 17 pokmas realisasi 16 pokmas atau 94.11 %.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	94.11	98.65	-4.54



Sasaran 6 : Meningkatnya Pengembangan Pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	laporan	1	1	100
2.	Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	5	5	100
3.	Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	sistem informasi	4	4	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	laporan	-	-	1	100
2	Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	-	-	5	100
3	Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	sistem informasi	-	-	4	100

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:
 - Capaian Kinerja pada sasaran “Meningkatnya pengembangan pembangunan desa dan kawasan perdesaan” yang diungkit dengan 3 (tiga) indikator yaitu *meningkatnya kapasitas pendampingan tenaga profesional pembangunan desa, jumlah Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) di tujuh Kabupaten* dan *data dan informasi pembangunan Desa dan kelurahan* adalah 100% atau dapat dikatakan berhasil.
- Peningkatan/Penurunan:
 - Tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Badan Pemberdayaan masyarakat



dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menjadi Dinas Pemberdayaan masyarakat (DPMPD) dan Pemerintahan Desa dikarenakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahn Daerah. Perubahan tersebut juga menyebabkan adanya perubahan/penambahan sasaran dan indikator kinerja utama pada DPMPD, dimana pada tahun 2017 ini capaian realisasi kinerjanya adalah 100%. Dimana hasil capaian kinerja permbangunan desa dan kawasan perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sbb:

Data Pembangunan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
1	PASER	10	139	871
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	1501
3	BERAU	12	100	457
4	KUTAI BARAT	16	190	585
5	KUTAI TIMUR	18	139	1575
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	173
7	MAHAKAM ULU	5	50	298
JUMLAH PROVINSI		81	841	5460

Data Pembangunan Sarana Olah Raga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA	JUMLAH SORGA DESA	VOLUME	BIAYA Rp.
1	PASER	10	139	11	7024	581.706.843
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	5	120	-
3	BERAU	12	100	27	1112	3.015.714.381
4	KUTAI BARAT	16	190	23	1071	4.530.714.250
5	KUTAI TIMUR	18	139	24	1	2.379.457.000
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	0	0	-
7	MAHAKAM ULU	5	50	23	5396,446	2.522.460.394
JUMLAH		81	841	113	14724,446	13.030.052.868



Data Pengelolaan EMBUNG DESA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH EMBUNG DESA	LUAS M2	BIAYA Rp.
1	PASER	10	139	2	3.300	528.632.000
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	1	24	29.039.400
3	BERAU	12	100	0	-	-
4	KUTAI BARAT	16	190	1	-	22.400.000
5	KUTAI TIMUR	18	139	6	1.714	282.917.500
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	0	-	33.357.000
7	MAHAKAM ULU	5	50	0	-	-
JUMLAH		81	841	10	5.038	896.345.900

Data Pembangunan Desa Bidang Pelayanan Sosial Dasar
(Pendidikan dan Kesehatan)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	KEC	DESA	JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN PSD	
				PENDIDIKAN	KESEHATAN
1	PASER	10	139	45	60
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	99	111
3	BERAU	12	100	35	62
4	KUTAI BARAT	16	190	108	83
5	KUTAI TIMUR	18	139	71	60
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	5	10
7	MAHAKAM ULU	5	50	22	28
JUMLAH PROVINSI		81	841	385	414



Data Profile Desa dan Kelurahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Dalam Tahap Penginputan Data ke Sistem Aplikasi Prodeskel

NO	KABUPATEN.KOTA	KEC	DESA	KEL	PROGRES PEKERJAAN (%) 2017
1	PASER	10	139	45	82,6
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	99	75
3	BERAU	12	100	110	100
4	KUTAI BARAT	16	190	23	12
5	KUTAI TIMUR	18	139	133	94,3
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	54	100
7	MAHAKAM ULU	5	50	4	4
8	Samarinda	10		19	32,2
9	Balikpapan	6		31	91
10	Bontang	3		14	93

Data Target Penyelesaian Profile Desa dan Kelurahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Data per bulan Desember 2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	PRODESCEL			KET
		SUDAH INPUT	PROSES	BELUM INPUT	
1.	Samarinda	19	0	40	
2.	Balikpapan	34	0	0	
3.	Bontang	14	0	1	
4.	Berau	110	0	0	
5.	Kutai Kartanegara	178	0	59	
6.	Kutai Barat	23	0	171	
7.	Kutai Timur	133	0	8	
8.	Penajam Pasertara	54	0	0	
9.	Paser	114	0	35	
10.	Mahakam Ulu	4	0	46	



Data Desa/Kelurahan Yang belum mendapatkan Jaringan (Blank Spot)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	KEC	DESA	KEL	Data Blankspot	
					DESA	KEL
1	PASER	10	139	45	67	0
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	99	55	0
3	BERAU	12	100	110	25	0
4	KUTAI BARAT	16	190	23	67	0
5	KUTAI TIMUR	18	139	133	34	1
6	PENAJAM PASERTARA	4	30	54	19	10
7	MAHAKAM ULU	5	50	4	31	0
8	Samarinda	10		19	0	1
9	Balikpapan	6		31	0	0
10	Bontang	3		14	0	2

Rekapitulasi Jumlah Pendamping
Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masayrakat Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

No	Kabupaten	Kec	Desa	TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)				Total Kabupaten
				TENAGA AHLI	PENDAMPING DESA-P	PENDAMPING DESA TI	PENDAMPING LOKAL DESA	
1	BERAU	12	100	6	12	7	18	43
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	6	26	15	52	99
3	PENAJAM PASER UTARA	4	30	4	6	4	8	22
4	KUTAI BARAT	16	190	6	21	11	39	77
5	PASER	10	139	6	17	10	36	69
6	MAHAKAM ULU	5	50	4	7	2	5	18
7	KUTAI TIMUR	18	139	5	19	11	34	69
	TOTAL	81	841	37	108	60	192	397



Lokasi Sasaran Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Tenggarong Seberang

No	Desa	Luas (Km2)	(%)
1	Bukit Pariaman	82,2	35,3
2	Kerta Buana	39,5	17
3	Bangunrejo	36,3	15,6
4	Embalut	26,9	11,5
5	Manunggal Jaya	15,5	6,7
6	Karang Tunggal	8,4	3,6
7	Bukit Raya	12,3	5,3
8	Perjiwa	11,6	5
Jumlah		232,7	100%

- Alternatif Solusi:

• Permasalahan:

- 1) Diwilayah Pembangunan Kawasan Perdeesaan, pembangunan sarana-prasarana belum memadai dalam membantu pelaksanan Program Kawasan
- 2) Status kepemilikan lahan Ex tambang belum jelas
- 3) Sinkronisasi OPD dan Perusahaan terkait status lahan belum maksimal
- 4) Penerbitan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi setiap tahunya selalu mengalami keterlambatan, sehingga menghambat Satker dalam melaksanakan kegiatan.
- 5) Sering terjadinya Revisi DIPA hingga sampai 5 Kali selama 1 Tahun, hal ini menyebabkan menghambat pelaksanaan kegiatan di Satker.
- 6) Anggaran Gaji Pendamping tidak seimbang dengan jumlah pendamping yang ada, hal ini menyebabkan progres serapan dana disatker mengalami penurunan.
- 7) Biaya Operasional Bagi Pendamping Desa sangatlah kecil, sementara tugas pendampingan seorang pendamping desa untuk di kalimantan timur sangatlah luas dibandingkan pendamping yang bertugas di Pulau Jawa, penyebab hal tersebut pendamping banyak yang ingin keluar dari program.



- 8) Peran Camat belum Optimal dalam mengawal Dana Desa.
- 9) Perlunya dilakukan Penguatan bagi Pendamping sesuai jenjang.
- 10) Masih banyak desa/kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kesulitan jaringan internet atau blankspot dan juga pasokan listrik yang belum stabil sehingga tidak dapat mengakses data profil desa/kelurahan secara online.
- 11) Operator Profil desa/kelurahan yang tidak tetap dan sering berganti seiring dengan digantinya Kepala Desa/Lurah.
- 12) Kondisi Topografi Provinsi Kalimantan Timur yang masih tertutup hutan dan pegunungan serta tertutup akses sungai yang cukup panjang juga banyak pulau – pulau terluar yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini sehingga untuk pembangunan dan pemasangan jaringan seluler masih sangat sulit untuk dilakukan.

- Solusi:

- 1) Diperlukan Alokasi anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten/Kota yang lebih besar untuk membuka akses jaringan menjadi suatu keharusan.
- 2) Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih kecil yang terdapat di setiap Desa untuk menunjang menara telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station) yang lebih besar.
- 3) Perlu memaksimalkan peran pendamping desa dalam mendampingi desa dalam pengisian data dasar profil desa/kelurahan agar diperoleh data dasar profil desa dan kelurahan dengan baik dan benar dan tingkat keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi desa/kelurahan.
- 4) Desa dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melakukan pelatihan profil desa/kelurahan yang dapat diusulkan di musyawarah desa, demikian juga Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya pemberian insentif bagi RT untuk mendata tiap KK.
- 5) Kabupaten/Kota agar menginstruksikan kepada desa/kelurahan untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran data profil desa/kelurahan secara online tiap bulan pada tahun berjalan agar diperoleh hasil analisis data profil desa/kelurahan yang update.



- 6) Perlu adanya regulasi yang jelas di tiap Kabupaten/Kota untuk mengatur batas administratif desa/kelurahan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 7) Untuk menetapkan 1 (satu) Wilayah sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan Pemerintah Hendaknya perlu mengkaji terlebih dahulu wilayah setempat salah satunya adalah pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang ada di wilayah tersebut.
- 8) Lahan Ex tambang yang akan diserahkan kepada Masyarakat, harus di selesaikan status kepemilikan lahan, agar ketika lahan akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan Kawasan tidak terjadi tumpang tindih.
- 9) Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, hendaknya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diminta untuk dapat mengalokasikan Dana Operasional (PAP) minimal 1% dari Total Dana Desa, hal ini di dilakukan untuk menunjang kegiatan - kegiatan Penguatan dan Pembinaan para pelaku Program Pembangunan Desa serta memberikan pelatihan usaha ekonomi agar kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa dapat meningkat.
- 10) Pemerintah Kabupaten diminta untuk segera membentuk Tim Pengendali Dana Desa dan melibatkan kepala OPD Teknis .
- 11) Peran Camat selaku Verifikasi Dana Desa harusnya lebih intens untuk melakukan Kunjungan ke Desa – Desa agar dapat mengetahui permasalahan yang ada di Desanya.
- 12) Aturan Mengenai Rekrutmen dan Penempatan Pendamping, sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, yang mana tujuannya adalah untuk memudahkan Satker Provinsi untuk melakukan Rekrutmen dan penempatan apabila terjadi kekosongan pendamping.



4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tahun 2017 kondisi Tahun anggaran 2017 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Kalau hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai, karena anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sangat kecil dan sangat jauh dari ideal untuk membiayai sebuah kegiatan pembangunan. Berada dalam kondisi seperti ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau target yang maksimal.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	100	99.67	0.33
		Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten			
		Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan			



Sasaran 7 : program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	posyantek	15	15	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	posyantek	15	15	15	-

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan:
 - Tahun 2017 target jumlah Posyantek Percontohan melalui pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui pemanfaatan TTG sebanyak 15 unit dapat tercapai 100 % sbb:

No	Kab/Kota	Kecamatan	Nama Posyantek
1.	Kutai Kartanegara	Sanga-Sanga	99 Sanga-Sanga
2.	Kutai Kartanegara	Tenggarong	Kota Raja
3.	Kutai Kartanegara	Loa Janan	Gamaloja
4.	Kutai Kartanegara	Anggana	Sungai Cermin
5.	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	Serba Guna
6.	Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Belayan
7.	Samarinda	Samarinda	Sambutan
8.	Samarinda	Samarinda Ilir	Tepian MM
9.	Balikpapan	Balikpapan Kota	Beriman
10.	Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sejahtera
11.	Kutai Barat	Barong Tongkok	Mitra Jaya
12.	Berau	Sambaliung	Sambaliung
13.	Penajam Paser	Waru	Mutiara



	Utara		
14.	Paser	Tanjung Harapan	Harapan Baru
15.	Paser	Muara Samu	Wattaka

- Peningkatan/Penurunan:
 - Target pembinaan Posyantek percontohan Tahun 2017 adalah 15 unit sama dengan target tahun 2015 dan 2016. Dimana diharapkan adanya penambahan dana anggaran untuk meningkatkan pembinaan Posyantek.
- Alternatif Solusi:
 - Permasalahan:
 - 1) Kurangnya tingkat pemahaman tentang Teknologi Tepat Guna.
 - 2) Rendahnya Sumber Daya Manusia yang terampil.
 - 3) Kurangnya biaya pembinaan kepada Posyantek yang sudah dibentuk.
 - 4) Kurangnya kepedulian terhadap sumber daya alam yang tersedia.
 - Solusi:
 - 1) Peningkatan SDM di Desa/Kelurahan.
 - 2) Program/Kegiatan kemasyarakatan melalui studi banding.
 - 3) Pemanfaatan dan pengembangan TTG di Desa/Kelurahan secara Efektif dan efisien.
 - 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas inovasi Teknologi Tepat Guna.
 - 5) Pembinaan berkelanjutan kepada semua Posyantek yang ada.



4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tahun 2017 kondisi Tahun anggaran 2017 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Kalau hanya bergantung pada kondisi keuangan, rasanya akan sulit target kinerja diatas dapat tercapai, karena anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sangat kecil dan sangat jauh dari ideal untuk membiayai sebuah kegiatan pembangunan. Berada dalam kondisi seperti ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau target yang maksimal.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	100	96.20	3.8



D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 laporan	1 laporan	100			
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	1 laporan	1 laporan	100	526.440.000,-	519.432.012,-	98.67
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	6 Desa/ Kelurahan	6 Desa/ Kelurahan	100			
			10 Unit Posyandu	8 Unit Posyandu				
			3 Unit PMT-AS	3 Unit PMT-AS	100			
			30 Unit PKK	30 Unit PKK	100			
			5 Unit MHA	5 Unit MHA	100			
			50 KPM	50 KPM	100			
3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	15 unit	15 unit	100	73.000.000,-	72.253.500,-	98.98
		Jumlah BUMDesa yang aktif	16 unit	15 unit				
		Jumlah Pasar Desa yang aktif	15 unit	14 unit				
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang terbentuk	18 unit	18 unit	100	195.304.000,-	192.664.700,-	98.65



5	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	17 unit	17 unit	100			
6	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	1 laporan	1 laporan	100	309.842.000,-	308.807.594,-	99.67
		Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	5 BKAD	5 BKAD	100			
		Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	4 sistem informasi	4 sistem informasi	100			
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	15 posyantek	15 posyantek	100	30.000.000,-	28.860.400,-	96.20



2. Realisasi anggaran per Program dan Kegiatan.

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1.673.200.000	1.632.767.566	97.58	
1)	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.673.200.000	1.632.767.566	97.58	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.184.000	237.888.302	99.46	
2)	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	15.000.000	15.000.000	100	
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana	224.184.000	222.888.302	99.42	
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	900.000.000	893.721.875	99.30	
4)	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	895.000.000	888.721.875	99.30	
5)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	5.000.000	100	
IV	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100.000.000	94.855.416	94.86	
6)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	60.000.000	55.799.000	93	
7)	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000	39.056.416	97.64	
V	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	576.440.000	569.432.012	98.78	
8)	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	347.440.000	343.172.465	98.77	
9)	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	50.000.000	50.000.000	100	
10)	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	48.000.000	46.975.200	97.87	
11)	Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	131.000.000	129.284.047	98.69	
VI	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	73.000.000	72.253.500	98.98	
12)	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	73.000.000	72.253.500	98.98	



VII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	10.000.000	9.903.000	99.03	
13)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000	9.903.000	99.03	
VIII	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	83.030.000	81.951.039	98.70	
14)	Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat	83.030.000	81.951.039	98.70	
IX	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	195.304.000	192.664.700	98.65	
15)	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	195.304.000	192.664.700	98.65	
X	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1.285.000.000	1.280.439.202	99.65	
16)	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai-Nilai Kegotong-royongan	1.030.000.000	1.028.319.552	99.84	
17)	Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	85.000.000	82.781.950	97.39	
18)	Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga	85.000.000	84.474.650	99.38	
19)	Pembinaan Hidup sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan	85.000.000	84.863.050	99.84	
XI	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000	28.860.400	96.20	
20)	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Pemanfaatan teknologi Tepat Guna	30.000.000	28.860.400	96.20	
XII	Program Pembangunan desa dan Kawasan	309.842.000	308.807.594	99.67	
21)	Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	309.842.000	308.807.594	99.67	
	Jumlah	5.475.000.000	5.403.544.606	98.69	



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Untuk mencapai Sasaran Indikator Kinerja Utama dilaksanakan Program/Kegiatankegiatan utama, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a.Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Saran dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
 - a.Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - a.Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - b.Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - a.Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - b.Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat Desa.
 - c.Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
 - d.Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
 - a.Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
 - a.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
8. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a.Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.



9. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - a. Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna
10. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.
 - a. Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan
 - b. Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
 - c. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat
 - d. Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
12. Program Pembangunan Desa dan Kawasan.
 - a. Pengembangan informasi pembangunan Desa dan Kelurahan.

Dalam Penyelenggaraan Program/Kegiatan Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.



- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.



- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dikategorikan sebagai :

- Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :
 1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
 2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
 3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
 4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.
- Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.



4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordiasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri dengan demikian membuka luas program/kegiatan dibawah kontrol dua Kementerian tersebut.

B. Saran

Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka saran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara lain :

- Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Pemerintahan Desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

- Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan pemerintahan kelurahan.
- Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta



memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

- Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala,

MOH.JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan fenomena yang berkembang belakangan ini. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh realisasi kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang selama tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah.

Untuk tahun 2017 kinerja yang dinilai dalam LkjIP berjumlah 7 (tujuh) sasaran, dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang diungkit dengan 5 (lima) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan nilai capaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 98.41%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target, namun dapat diatasi dengan baik sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan. Dimana pada tahun 2017 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran disemua program kegiatan. Berada dalam kondisi ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau pencapaian target yang maksimal.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 ini dapat menjadi tolok ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Kepala,

MOH.JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha esa, karena hanya atas perlindungan dan petunjuk-NYA jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 diharapkan dapat mendorong transparansi perjanjian kinerja dan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini akan memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Kepala,

MOH.JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERJANJIAN KINERJA (PK)

**INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
(IKI)**

RENCANA AKSI

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
(RKT)**

PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2017

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROVINSI**

LAPORAN KINERJA PERTRIWULAN

PENGUKURAN KINERJA (REALISASI)

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi**
- B. Tugas dan Fungsi**
- C. Struktur Organisasi**
- D. Sumber Daya Manusia**
- E. Aspek Strategis Organisasi**
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**
- G. Sarana dan Prasarana Kerja**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis**
- B. Indikator Kinerja Utama**
- C. Perjanjian Kinerja**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya**
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi**
- C. Analisis Capaian Kinerja**
- D. Realisasi Anggaran**

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- 2. PERJANJIAN KINERJA**
- 3. PENGUKURAN KINERJA (REALISASI)**
- 4. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**
- 5. RENCANA AKSI ATAS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017**
- 6. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**
- 7. PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2017**
- 8. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI INSPEKTORAT PROV.KALTIM TAHUN 2016**
- 9. LAPORAN KINERJA PERTRIWULAN**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	1	Capaian Desa / Kelurahan yg berhasil dlm pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan (angka absolute)	Provinsi/ Kab/ Kota	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	1	Meningkatnya Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	6	Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang berprestasi (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Unit Posyandu	10	Meningkatnya Nilai Gizi Anak	Jumlah Unit Posyandu yang dibina (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			Unit PMT - AS	3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Unit PMT - AS yang dibina (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			Unit PKK	30	Meningkatnya Peran PKK	Jumlah Unit PKK yang dibina (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			Unit MHA	5	MHA Berpartisipasi Dalam proses Pembangunan	Jumlah MHA yang terinventarisasi (angka absolute)	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
			KPM	50	Mewujudkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat Dalam Upaya Penguatan Pengembangan Kader Kapasita Masyarakat	Jumlah KPM sebanyak 50 orang yang diberikan bimbingan dan pengarahan melalui penguatan pengembangan kapasitas kader Masyarakat di Kab. Kukar	Provinsi/ Kabupaten dan Kota	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes Yang Terbentuk	Unit	15	Mengukur jmlah BUMDesa yang berhasil dibentuk sesuai UU No. 6/2014; PP.No.43/2014; dan Permendesa, PDTT No. 4/2015	Jumlah BUMDesa yang berhasil dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan Desa diwilayah Kabupaten	Laporan Data Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dari daerah Kabupaten	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	Unit	18	Membentuk lembaga masyarakat yang memberikan pelayanan teknis informasi pemanfaat TTG	Jumlah Pengelolaan Posyantek / Wartek yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010	Laporan pengembangan Posyantek/ Wartek TTG di Kabupaten/ Kota	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
5	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Pokmas	17	Pembentukan Pokmas Berdasarkan Surat Mendagri No. 413.5/1184/SJ/ tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Fasilitas Umum dilingkungan Permukiman masyarakat dan ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kaltim Tahun 2012 dan 2015. Dan Surat Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah	Laporan Perkembangan dan pembentukan dari Kabupaten/ Kota	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
6	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan	1	Menuju Desa Mandiri	Jumlah Laporan (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
					Menjadi Pendamping Profesional Desa	Jumlah Laporan (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
					Terciptanya Desa yang Mandiri	Jumlah Laporan (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	5	Terciptanya Badan Kerjasama Antar Desa yang Mandiri	Jumlah Unit BKAD yang dibina (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi	4	Agar Sistem informasi Desa dapat diakses seluruh Desa di Kaltim	Jumlah Sistem (angka absolute)	Laporan Tahunan	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	Posyantek	15	Membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan teknis informasi pemanfaat Teknologi Tepat Guna sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian	Jumlah Posyantek yang dibina (angka absolute)	Laporan pertanggung jawaban Posyantek/ Wartek TTG di Kabupaten/ Kota	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Kepala DPMPD

Moh. Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1Laporan	-			
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	1Laporan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp292.440.000,00		
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	6Desa/ Kelurahan				1Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10Unit Posyandu				
			3Unit PMT - AS				
			30Unit PKK				
			5Unit MHA	2Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Rp71.000.000,00		
		50KPM	3Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Rp48.000.000,00			
3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes Yang Terbentuk	15Unit	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	Rp48.000.000,00		
				1Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat			
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	18Unit	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna			
5	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	17Pokmas	1Pemasyarakatan dan pengembangan Penerapasn Teknologi Tepat Guna	Rp160.304.000,00		
6	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	1Laporan	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Rp174.842.000,00		
		Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	5BKAD	1Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan			
		Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	4Sistem Informasi				

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	15 Posyantek	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat		
				1 Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp30.000.000,00	

Kepala DPMPD,

Moh. Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

RENCANA AKSI TAHUN 2017

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Target per triwulan				Program/Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
														Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
				1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	15 Posyantek	3	5	5	2	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat		POSYANTEK Percontohan yang Dibina	15 Posyantek	1. Pembinaan dan pengembangan Posyantek 2. Rapat Teknis	Seksi Pendayagunaan SDA dan TTG												
								1 Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp30.000.000,00																

Kepala DPMPD,

Moh. Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA **TAHUN 2017**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	1 Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Laporan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 1 TW 4 : 0	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	5 Jumlah Desa dan kelurahan yang berprestasi	Desa/Kelurahan		6 Rp205.720.000	APBD
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong	Laporan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 1	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang Dibina	Kab/Kota	10	Rp86.720.000,00	APBD
	2 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	Desa/ Kelurahan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 6 TW 4 : 0			2 Jumlah Pelaksana POSYANDU yang dibina	Posyandu	10		
		Unit Posyandu	TW 1 : 1 TW 2 : 4 TW 3 : 3 TW 4 : 2			3 Jumlah Pelaksana PMT AS yang dibina	Sekolah	3		
		Unit PMT-AS	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 3			4 Jumlah Pelaksana PKK yang dibina	PKK	6		
		Unit PKK	TW 1 : 5 TW 2 : 10 TW 3 : 15 TW 4 : 5							

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Unit MHA	TW 1 : 0 TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : 2		2 Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	1 Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	MHA	5	Rp71,000,000.00	
						2 Jumlah TP-PKK yang dibina	TP-PKK	30		
		KPM	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 :50 TW 4 : 0		3 Pengembangan Kapasitas Masyarakat	1 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	orang	50	Rp 48,000,000.00	
3 Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	1 Jumlah BUMDes yang Terbentuk	Unit	TW 1 : 4 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 3	1 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 Pemasyarakatan dan pengembangan Penerapatn Teknologi Tepat Guna	1 Jumlah BUMDesa Aktif	unit	16	Rp48.000.000,00	APBD
	2 Jumlah BUMDes yang Aktif	Unit	TW 1 : 4 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 4			2 Jumlah Pasar Desa yang aktif	unit	15		
	3 Jumlah Pasar Desa yang Aktif	Unit	TW 1 : 4 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 3			3 Laporan Kegiatan	pelaporan	1		
4 Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan	1 Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang Terbentuk	Unit	TW 1 : 3 TW 2 : 7 TW 3 : 5 TW 4 : 3	1 Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	1 Pemasyarakatan dan pengembangan Penerapatn Teknologi Tepat Guna	1 Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang memiliki Daya Saing Pasar	Posyantek	18	Rp160.304.000,00	APBD

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Unit	TW 1 : 3 TW 2 : 7 TW 3 : 5 TW 4 : 3			2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Melaksanakan Konservasi Lingkungan Perdesaan/Kecamatan	Pokmas	17		
6 Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1 Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Tenaga Profesional Pembangunan Desa	Laporan	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 1	1 Program Pembangunan Desa dan Kawasan	1 Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	1 Jumlah Data Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan	sistem informasi	4	Rp174.842.000,00	APBD
	2 Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Di Tujuh Kabupaten	BKAD	TW 1 : 0 TW 2 : 3 TW 3 : 2 TW 4 : 0			2 Jumlah Kabupaten yang dibina	Kabupaten	5		
	3 Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Sistem Informasi	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 0 TW 4 : 2			3 Jumlah Pendamping Desa yang dibina	Orang	50		
						4 Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	kali	1		
7 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 Jumlah Posyantek Percontohan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	Posyantek	TW 1 : 3 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 2	1 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 POSYANTEK Percontohan yang Dibina	Posyantek	15	Rp30.000.000,00	APBD

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala,

Moh.Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
Nip.1611216 198603 1 014